

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara maka Pemerintah Daerah berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah. Atas laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah tersebut akan dinilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasinya oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dengan melakukan pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah yang memuat opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 pasal 16 (Fatimah, Sari & Rasuli, 2014).

Pada saat melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selalu memberikan opini untuk mengelompokkan Laporan Keuangan mana saja yang telah memiliki informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Jenis Opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk Laporan Keuangan yang telah diperiksanya adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), WDP (Wajar Dengan Pengecualian), TW (Tidak Wajar) serta TMP (Tidak Memberikan Pendapat/*Disclaimer*).

Dari beberapa opini yang dapat diterbitkan BPK RI, opini wajar tanpa pengecualian (WTP) merupakan opini tertinggi yang dicita-citakan oleh semua pemerintah daerah. Perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan suatu prestasi dan kebanggaan tersendiri bagi pemerintah daerah bersangkutan, di samping sebagai upaya untuk menyukseskan terealisasinya salah satu target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu tercapainya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) (Fatimah, Sari & Rasuli, 2014).

Adapun fenomena yang terjadi mengenai pencapaian opini audit yaitu, Provinsi Jawa Barat selama 7 tahun secara berturut-turut dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2018 menunjukkan 25 dari 28 lembaga pemerintah daerah yang ada di Provinsi Jawa Barat, di antaranya telah mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Meskipun demikian, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih menemukan adanya penyimpangan atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya yang berdampak adanya potensi kerugian negara. Maka hal ini terungkap dalam laporan hasil pemeriksaan.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih menemukan beberapa permasalahan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2017 atau pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 2018 terkait Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam Buku II Laporan Hasil pemeriksaan atas

Sistem pengendalian Internal dan Buku III Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Namun, permasalahan tersebut tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan dikarenakan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukan jaminan tidak adanya korupsi dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Tetapi, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan indikator bahwa tata kelola keuangan dilakukan dengan baik dan benar (BPK RI, 2018, from: www.bpk.go.id/news/ketua-bpk-serahkan-lhp-lkpd-provinsi-jawa-barat-tahun-anggaran-2017/, 1 Mei 2019)

Sedangkan pada 3 lembaga pemerintahan daerah yang mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yaitu Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Subang secara umum terdapat permasalahan asset, yaitu beberapa asset yang tidak diketahui keberadaannya dan pemanfaatannya pun masih belum jelas, padahal permasalahan ini sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini terkait belum adanya penyelesaian kasus pengelolaan asset dan keuangan, selain itu penyajian modal pemerintah yang tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) (Pikiran Rakyat, from: www.pikiran-rakyat.com/, 1 Mei 2019).

Dari uraian kasus di atas, maka dapat dilihat bahwa adanya beberapa faktor yang dapat mempengaruhi opini audit laporan keuangan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah menyatakan bahwa:

Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah adalah Sistem Pengendalian Internal yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah.

Sedangkan pengertian Sistem Pengendalian Internal menurut Permendagri No. 4 Tahun 2008 Pedoman Pelaksanaan Riviur Atas Laporan Keuangan Daerah Pasal 1(10) adalah:

Sistem Pengendalian Internal adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam penciptaan efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keandalan penyajian keuangan daerah.

Dari pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal merupakan seluruh kegiatan dan prosedur yang berdasarkan kebijakan dan dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan organisasi telah tercapai melalui kegiatan yang efektif, efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi opini audit laporan keuangan adalah kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan keuangan yang berkualitas memenuhi karakteristik yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

(LKPD) adalah gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan entitas tersebut. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat diandalkan, suatu organisasi harus memiliki pengendalian yang efektif, karena dengan pengendalian internal dapat meningkatkan kualitas informasi dan memberikan keyakinan tentang keandalan informasi keuangan (Johnstone, Gramling and Rittenberg, 2014: 6 dalam Fatimah, Sari & Rasuli, 2014).

Mulyana (2010: 94) mendefinisikan kualitas sebagai “kesesuaian dengan standar, diukur berbasis kadar ketidaksesuaian, serta dicapai melalui pemeriksaan”. Berdasarkan definisi tersebut tampak bahwa kualitas merujuk pada pengertian pemenuhan standar atau persyaratan tertentu yang mana hal tersebut dinilai melalui hasil pertanggungjawaban suatu entitas, baik dari segi yang berwujud seperti barang maupun segi yang tidak berwujud, seperti suatu kegiatan.

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kualitas Laporan keuangan suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggung jawaban pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu laporan keuangan yang disajikan harus menyangkut semua informasi yang terjadi dalam Pemerintah Daerah sehingga laporan keuangan yang disajikan tersebut relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dimengerti untuk tujuan pengambilan keputusan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka perlu dilakukan penelitian terhadap variabel-variabel yang dapat mempengaruhi Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah sebagai tolak ukur mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sehingga judul yang dipilih dalam penelitian ini adalah **“Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah (Studi Kasus pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat)”**.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat.
2. Bagaimana Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat.
3. Bagaimana Opini Audit Laporan Keuangan pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat.
4. Seberapa besar pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat.
5. Seberapa besar pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat.

6. Seberapa besar pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara Simultan terhadap Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui Opini Audit Laporan Keuangan pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat.
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat.
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat.
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara

Simultan terhadap Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun beberapa kegunaan yang didapatkan dalam penelitian ini, di antaranya adalah sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis/ Akademis

Adapun kegunaan yang akan didapatkan dalam penelitian ini, di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memperluas ilmu pengetahuan yang didapat khususnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi BPK-RI memberikan opini audit atas laporan keuangan pemerintahan daerah.
- b. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan agar terdapat kesesuaian antara teori dan praktek.
- c. Untuk menambah wawasan penulis dan pembaca, khususnya mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan dalam mengimplementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang berkualitas dan Opini Audit atas Laporan Keuangan

1.4.2 Kegunaan Praktis/ Empiris

1. Bagi Penulis

- a. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menempuh sidang skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan.
- b. Diharapkan bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai metode penelitian yang menyangkut masalah audit internal.
- c. Diharapkan dapat melatih kemampuan dalam teknis analisis yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan referensi bagi penelitian berikutnya yang tertarik untuk meneliti kajian yang sama yaitu Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah di waktu yang akan datang.

3. Bagi Instansi yang Diteliti

- a. Memberikan referensi untuk perusahaan mengenai Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan informasi kepada perusahaan mengenai peranan sistem pengendalian internal yang efektif dan peningkatan kualitas laporan keuangan untuk mendapatkan opini audit wajar tanpa pengecualian atas laporan

keuangan pemerintah daerah dan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat memberikan kontribusi memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

4. Bagi Pihak Lain

Diharapkan dapat berguna sebagai masukan dari dokumen untuk melengkapi sarana yang dibutuhkan dalam penyediaan bahan studi bagi pihak yang membutuhkan.

1.5 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Untuk memperoleh data yang diperlukan penulis melakukan penelitian pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat yang berlokasi di Jalan Surapati No.4 Citarum, Kota Bandung. Penelitian ini dilakukan mulai dari tanggal SK penelitian sampai dengan selesai.